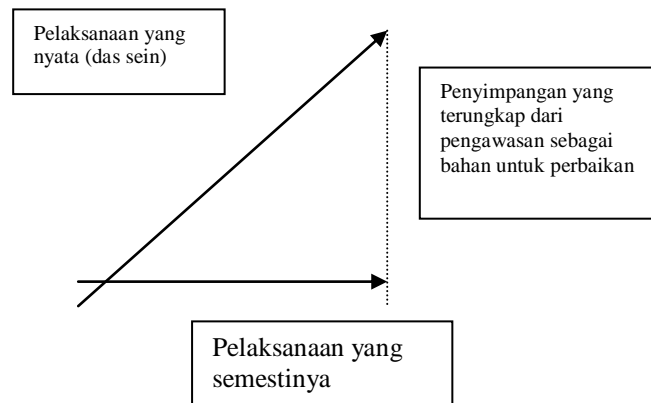


PENGAWASAN DAN PENILAIAN SATUAN PENDIDIKAN

Konsep Dasar dan Fungsi Pengawasan di bidang Pendidikan

Pada dasarnya pengawasan merupakan sesuatu yang sangat esensial dalam kehidupan organisasi untuk menjaga agar kegiatan-kegiatan yang dijalankan tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Dengan pengawasan akan diketahui keunggulan dan kelemahan dalam pelaksanaan manajemen, sejak dari awal, selama dalam proses, dan akhir pelaksanaan manajemen. Fungsi pengawasan dalam manajemen dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1
Fungsi Pengawasan Dalam Manajemen

Keberhasilan proses pengawasan ditentukan oleh penilaian yang secara rinci dapat dapat memberikan umpan balik berupa gambaran yang jelas tentang tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang dikehendaki. Para pengawas dan Kepala Sekolah tidak akan dapat membuat saran-saran untuk perbaikan organisasi dan program sekolah yang diinginkan, kecuali jika pada mereka tersedia hasil-hasil penilaian (Oteng Sutisna, 1986).

Dalam kaitan ini jelaslah bahwa fungsi pengawasan mencakup pengendalian, penilaian, pelaksanaan dan pengambilan tindakan penertiban yang sifatnya represif dan preventif terhadap kegiatan manajemen dalam organisasi. Oleh karena pengawasan dapat berfungsi sebagai suatu alat pencegah terjadinya penyimpangan. Apabila dalam tindakan pengawasan dikemukakan hambatan atau penyimpangan hendaknya diambil tindakan positif berupa perbaikan atau perubahan dalam pelaksanaannya.

Dalam manajemen pendidikan, tindakan pengawasan dan penilaian merupakan dua fungsi yang sangat erat kaitannya. Dengan demikian fungsi pengawasan dan penilaian pendidikan tidak hanya memeriksa tindakan yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, tetapi sebaiknya menjadi motor penggerak pembaharuan pendidikan, dan dapat membina sekolah yang baik (Depdikbud, 1981).

Implikasi dari pendekatan ini ialah, bahwa derajat produktivitas sistem manajemen pendidikan ditentukan oleh mekanisme kerja sistem pengawasan dan penilaian pendidikan yang dikembangkan oleh pengelola, disamping partisipasi bawahan/staf yang lebih bermotivasi dalam operasionalisasi program tersebut.

Istilah pengawasan dalam organisasi bersifat umum, sehingga terdapat beberapa pengertian yang bervariasi seperti mengadakan pemeriksaan secara terinci, mengatur

kelancaran, membandingkan dengan standar, mencoba mengarahkan atau menugaskan, serta untuk pembatasannya atau pengekangan (Kost and Rosenzweig, 1981). Namun pada dasarnya pengawasan merupakan fungsi manajemen dimana setiap manajer untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan yang dikehendaki.

Dalam literature manajemen, pengawasan diartikan sebagai proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan dimaksudkan untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan, kemudian membetulkannya dan mencegah perulangannya. Pengawasan dalam konsep ini berkaitan dengan orang, kegiatan, benda (Oteng Sutisna, 1986). Pengawasan dalam pendidikan berarti mengukur tingkat efektivitas kerja personil pendidikan dan tingkat efisiensi penggunaan sumber-sumber daya pendidikan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Berdasarkan pengertian ini sasaran pengawasan pendidikan tidak hanya dalam substansi manajemen, akan tetapi juga menyangkut kegiatan professional yang harus diselenggarakan sebagai beban kerja setiap personil pendidikan/unit kerja yang ada (Hadari Nawawi, 1983).

Dalam beberapa pengertian diatas, pada dasarnya pengawasan mempunyai dua unsur pokok, yaitu : 1) pengawasan menekankan kepada proses dan 2) pengawasan diarahkan kepada koreksi dan membandingkan dengan tujuan.

A. *Fungsi Pengawasan Pendidikan*

Secara umum telah dikemukakan bahwa hasil pengawasan dapat memberikan manfaat bagi perbaikan dan peningkatan efektivitas proses manajemen organisasi. Lebih lanjut Hadari Nawawi (1983) mengemukakan bahwa fungsi pengawasan antara lain :

1. Memperoleh data yang setelah diolah dapat dijadikan dasar bagi usaha perbaikan kegiatan dimasa yang akan datang.
2. Memperoleh cara bekerja yang paling efisien dan efektif atau yang paling tepat dan paling berhasil sebagai cara yang terbaik untuk mencapai tujuan.
3. Memperoleh data tentang hambatan-hambatan dan kesukaran-kesukaran yang dihadapi, agar dapat dikurangi atau dihindari.
4. Memperoleh data yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan usaha pengembangan organisasi dan personil dalam berbagai bidang.
5. Mengetahui seberapa jauh tujuan telah tercapai.

Secara khusus dapat dikemukakan bahwa fungsi pengawasan pendidikan (sekolah), adalah :

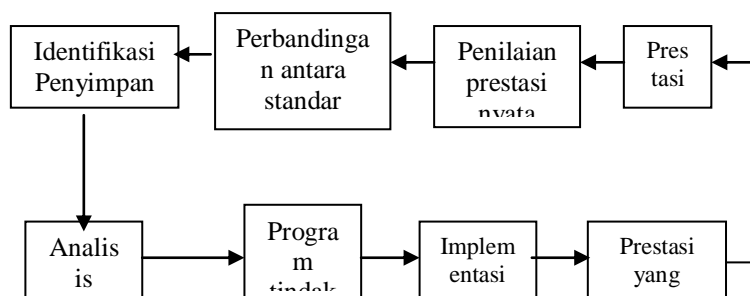
- 1) Mengusahakan suatu struktur yang terorganisir dengan baik dan sederhana untuk menghilangkan salah pengertian diantara personil sekolah.
- 2) Mengusahakan supervisi yang kuat untuk menghilangkan “gap” yang terjadi dalam keseluruhan program sekolah.
- 3) Mengusahakan informasi yang akurat dalam rangka pembuatan keputusan dan penilaian terhadap pelaksanaan pendidikan.

B. *Proses Pengawasan Pendidikan*

Pengawasan terdiri dari kegiatan-kegiatan yang merupakan upaya agar peristiwa dan kegiatan dalam organisasi serasi dengan rencana. Meskipun setiap organisasi mempunyai karakteristik yang berbeda (tergantung pada misi, jenis, bentuk dan sebagainya), tetapi dalam kegiatan pengawasan semua organisasi melaksanakan tahapan-tahapan pokok yang sama. Tahapan-tahapan tersebut yaitu : penentuan standar, pengukuran, perbandingan hasil pengukuran dengan standar, dan upaya “correction action”. Oteng Sutisna (1986) bahkan meringkasnya menjadi tiga langkah besar: 1) menyelidiki apa yang sedang dilakukan; 2)

membandingkan hasil-hasil dengan harapan; 3) menyetujui hasil-hasil itu atau tidak menyetujuinya, dalam hal yang terakhir perbaikan yang hendaknya diambil.

Pengawasan manajemen biasanya merupakan sistem umpan balik. Hubungan antara standar; penilaian dan koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2
Daur Pengawasan

Fungsi pengawasan pendidikan merupakan yang memerlukan penerapan berbagai metode dan teknik untuk mendorong para pelaksana dalam rangka mencapai tujuan. Apabila proses manajemen dilaksanakan dengan baik, sekaligus kita dapat melihat dan memberikan supervisi yang kontinu atas pelaksanaan kerja pendidikan. Dalam petunjuk umum pelaksanaan pengawasan sekolah di lingkungan Kanwil Depdikbud Profinsi Jawa Barat (1985) dikemukakan bahwa secara garis besar prosedur tahap pengumpulan data dan informasi, tahap pembuatan pertimbangan, dan tahap pengambilan keputusan.

C. *Karakteristik Pengawasan yang Efektif*

Beberapa karakteristik dari proses pengawasan yang efektif (Oteng Sutisna, 1986) adalah :

- Pengawasan hendaknya disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan organisasi.
- Pengawasan hendaknya diarahkan pada penemuan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan.
- Pengawasan mengacu pada tindakan perbaikan.
- Pengawasan yang dilakukan bersifat fleksibel yang preventif.
- Sistem pengawasan dapat dipakai oleh orang-orang yang terlibat dalam pengawasan.
- Pelaksanaan pengawasan harus mempermudah tercapainya tujuan-tujuan. Oleh Karena itu pengawasan harus bersifat membimbing supaya para pelaksana meningkatkan kemampuan mereka dalam melaksanakan pekerjaannya.

D. *Isu Pengawasan Pendidikan di Sekolah.*

Pengawasan pendidikan di sekolah harus memberikan dampak yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan organisasi sekolah. Dalam pendidikan di sekolah pengawasan dipakai dalam dua arti. Pertama pengawasan meliputi kegiatan mengarahkan dan membimbing maupun menilik, mempertimbangkan, dan menilai. Perhatiannya berpusat pada pelaksanaan-pelaksanaan dan hasil-hasilnya. Kegiatan pengawasan semacam ini dipikirkan terutama sebagai proses penerapan kekuasaan melalui alat dan teknik pengawasan untuk menetapkan apakah rencana-rencana, kebijaksanaan-kebijaksanaan, instruksi-instruksi, dan prosedur-prosedur yang ditetapkan diikuti (Oteng

Sutsina, 1986). Kedua, pengawasan yang menyediakan kondisi yang perlu untuk menyelesaikan tugas kewajiban dengan efektif dan efisien. Pengawasan dalam pengertian ini hendak menjamin keselarasan, kecerdasan, dan ekonomi pada semua upaya pendidikan. Pengawasan bias digunakan tidak hanya untuk mencegah salah, melainkan juga mengarahkan tindakan-tindakan pada tujuan organisasi sekolah.

Berdasarkan konsep tersebut, pelaksanaan pengawasan di sekolah harus mencakup pengendalian yang bersifat administrative dan akademik atau proses pengajaran. Tetapi dalam prakteknya pelaksanaan pendidikan yang selama ini diterapkan cenderung hanya menyangkut aspek material saja seperti pemeriksaan keuangan, fasilitas, tata usaha kantor, sedangkan pengamatan dan pengendalian terhadap proses belajar mengajar sering kali luput dari perhatian. Bahkan pengawasan terhadap keseluruhan aspek dari fungsi manajemen pun tetap belum terlaksana.

Pengawasan tampaknya masih terkotak-kotak dan masih belum membentuk sistem yang mudah yang dapat merupakan instrumen untuk menjaga kelancaran proses manajemen pendidikan di sekolah. Pengawas di lembaga pendidikan selama ini lebih menonjolkan segi fisik, seperti pengelolaan dana, alat, bangunan, dan pegawai. Yang kurang mendapat perhatian, padahal merupakan sasaran yang amat penting, adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan proses belajar mengajar yang berlangsung di sekolah (Djam'an Satori, 1990). Perhatian terhadap sekolah hendaknya ditunjukkan untuk mengkaji kesulitan-kesulitan teknis edukatif yang dihadapi guru-guru, bukan mengkaji hal-hal yang berurusan dengan teknis formal semata.

Kondisi birokrasi yang sentralistis, otoriter dan menghadapi persoalan multikompleks, juga tentunya mempersulit terlaksananya pengawasan secara efektif (Waluyo Rodam, 1989).

E. Konsep dasar Penilaian Pendidikan.

Kita sudah paham bahwa dalam proses pendidikan di sekolah selalu melibatkan unsure penilaian. Namun keberadaan unsure ini tidak senantiasa dapat memberikan fungsi yang bersifat komprehensif bagi sekolah terutama yang menyangkut perbaikan dan pengembangannya.. Banyak factor yang berpengaruh berkenaan dengan fungsi penilaian dalam peningkatan program sekolah, salah satunya adalah makna yang ditafsirkan dari konsep penilaian itu sendiri.

Dalam praktek, bermacam-macam definisi penilaian telah dikembangkan. Pada kesempatan ini, penilaian akan didefinisikan dalam konteks pengembangan program pendidikan. Oleh Karen itu sangat penting dipahami bahwa tujuan penilaian bukan untuk membuktikan, akan tetapi memperbaiki (Stuf Lebeam, 1971). Dengan kerangka pemikiran ini tampak ada kaitan yang erat antara penilaian dan mutu pendidikan di sekolah. Selanjutnya konsep penilaian yang akan dibicarakan bertitik tolak dari tujuan penilaian tersebut.

Penilaian pendidikan merupakan suatu proses penentuan nilai atau keputusan dalam bidang pendidikan atau segala sesuatu yang ada hubungannya dengan bidang pendidikan. Penentuan keputusan itu didahului dengan kegiatan pengumpulan data atau informasi, sehingga seorang pimpinan dapat menyusun suatu kebijakan terhadap suatu program yang sedang dikembangkan atau yang sedang dilaksanakan. Setiap orang yang terlibat dalam pendidikan, bagaimanapun macam dan ruang lingkup keputusan pendidikan itu, keputusan tersebut memerlukan informasi yang lengkap dan tepat. Informasi semacam ini akan diperoleh melalui penilaian.

Lee J. Cronbach (1990) merumuskan bahwa penilaian sebagai kegiatan pemeriksaan yang sistematis dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dan akibatnya pada saat program dilaksanakan pemeriksaan yang diarahkan untuk membantu memperbaiki program itu dan program lain yang memiliki tujuan yang sama. Pengertian yang terkandung dalam definisi Cronbach, pada dasarnya sama dengan definisi diatas, bahwa penilaian meminta tindakan lanjutan, yang pada dasarnya kearah penyempurnaan.

F. Tujuan dan Sasaran Penilaian Pendidikan.

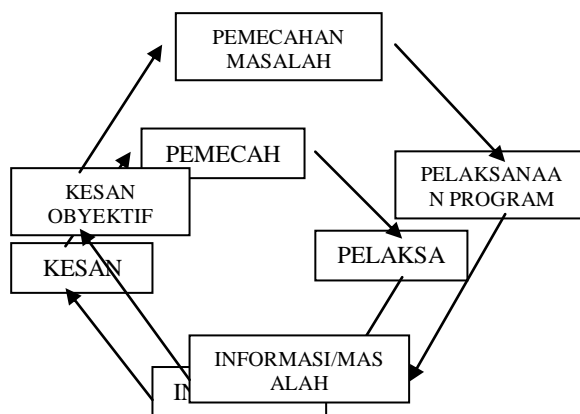
Para penilai yakin bahwa hasil kerjanya akan bermanfaat bagi para personil pendidikan dalam mengambil keputusan yang lebih baik jika dibandingkan dengan tidak ada kegiatan penilaian seperti yang mereka lakukan. Karena itu Oteng Sutisna merumuskan (1986) bahwa kegiatan penilaian pendidikan mempunyai tujuan-tujuan sebagai berikut :

1. untuk memperoleh dasar bagi pertimbangan pada akhir suatu periode kerja.
2. Untuk menjamin cara bekerja yang efektif dan edisien.
3. Untuk memperoleh fakta-fakta tentang kesukaran-kesukaran dan untuk menghindarkan situasi-situasi yang dapat merusak.
4. Untuk memajukan kesanggupan para guru dan orang tua murid dalam mengembangkan organisasi sekolah.

Permasalahan yang digarap dalam lapangan pendidikan cukup banyak, mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai jenis dan jalur pendidikan. Namun titik pusat usaha pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan dengan sengaja bagi perolehan hasil yang berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap (Suharsimi Arikunto, 1988). Karena itu Nana Sudjana (1989) dan Nuhi Nasution (1978) menyatakan bahwa lingkup penilaian pendidikan meliputi penilaian terhadap program pendidikan, proses pelaksanaan program dan hasil program. Selanjutnya Depdikbud (1985) memberikan rincian tentang aspek-aspek yang dinilai dari perencanaan program, pelaksanaan program dan hasil program tersebut meliputi aspek-aspek : akademik atau pengajaran, kegiatan umum sekolah (penerimaan murid baru, kalender ajaran, kegiatan umum sekolah, kalender mutasi, EBTA), personil pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, tata usaha sekolah, pembiayaan, manajemen, dan hubungan kerja sekolah dengan instansi lain dan masyarakat.

G. Pengajaran Sebagai Bagian Integral Pendidikan di Sekolah.

Penilaian terhadap suatu program pendidikan merupakan salah satu sub-sistem pendidikan yang memiliki peranan setara sub sistem pendidikan lainnya di sekolah. Bahkan jika kita mau berkata secara jujur maka sub sistem ini dapat memberikan informasi yang lengkap dan menyeluruh mengenai kegiatan pendidikan yang telah selesai dilakukan (Subino, 1991:1). Penilaian tidak hanya terdiri atas serpihan-serpihan informasi mengenai kegiatan pendidikan, akan tetapi secara konfiguratif menjelaskan kaitan fungsional antar sub sistem yang ada pada kegiatan pendidikan. Penilaian sebagai bagian integral pendidikan di sekolah dapat dikembangkan melalui model “Built in evaluation” yang dapat dilukiskan pada diagram berikut :



Gambar 3
“Built in Evaluation”

Sumber : Diadaptasi dari model Djam'an Satori.

Bagan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pimpinan Sekolah sebagai administrator mencari informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan (1) yang diperoleh adalah sejumlah informasi atau masalah kegiatan pendidikan, yang selanjutnya perlu dikaji, (2) sehingga diperoleh kesan objektif tentang pelaksanaan pendidikan di sekolah, misalnya cara mengajar guru. Kesan tersebut perlu disampaikan (3) kepada pihak yang berkepentingan (guru, orang tua masyarakat, atasan) sehingga melahirkan dialog yang pada dasarnya dapat berlangsung antara pihak-pihak yang terlibat itu. Informasi (berupa gagasan atau alternatif pemecahan) yang diperoleh melalui dialog tersebut digunakan untuk memperbaiki/menyempurnakan program pendidikan (4) yang pada gilirannya akan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

Proses penilaian yang dikemukakan itu mengandung beberapa hal penting yaitu ;

1. Perlunya kejelasan informasi apa yang dibutuhkan
Kejelasan informasi yang dibutuhkan penitng untuk diperhatikan, jika ingin mengetahui efektivitas penggunaan laboratorium IPA, penilai harus menetapkan informasi apa yang harus dicari sehingga memberi keyakinan akan efektivitas penggunaan laboratorium tersebut.
2. Bagaimana caranya memperoleh informasi tersebut
Perolehan informasi dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti ; tes wawancara, atau observasi. Namun demikian perlu ditetapkan sumber informasinya dan kapan informasi itu dapat diperoleh, sehingga relevan dengan maksud-maksud penilaian.
3. Bagaimana menyajikan informasi itu agar mudah dipahami
Kesimpangsiuran dalam penafsiran dan penggunaan informasi, salah satunya disebabkan oleh penyajian informasi yang kurang efektif. Informasi harus disajikan dengan baik dan disampaikan kepada yang berkepentingan, misalnya dalam upacara bendera, rapat dinas, pertemuan dengan orang tua/msyarakat serta dalam pertemuan dengan pihak swasta.
4. Fungsi informasi sebagai hasil penelitian banyak tergantung kepada cara-cara penggunaan informasi itu.
Karena itu informasi tersebut harus dapat digunakan secara terbuka baik oleh warga sekolah, orang tua, masyarakat luas dan pengambil kebijakan bagi usaha perbaikan/pengembangan program pendidikan.

H. Arah Penilaian Pendidikan

Tujuan dan kegunaan penilaian dapat diarahkan kepada kepentingan berbagai keputusan seperti kaitannya dengan perencanaan, pengelolaan, proses, dan tindak lanjut pendidikan baik yang menyangkut perorangan, kelompok, maupun kelembagaan.

Jika kita ingin melihat pendidikan sebagai pembentukan manusia Indonesia yang memiliki karakteristik khas sebagaimana yang diamanatkan dalam GBHN dan UU No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, penilaian dapat diarahkan kepada dua hal sebagai berikut :

1.Orientasi pada Nilai Intrinsik Pendidikan (Manusia Paripurna)

Pendidikan merupakan upaya dalam membina manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan (UUSPN Pasal 4).

Ada pandangan bahwa gagasan sekolah yang utama adalah bidang intelektual atau kognitif, sedangkan bidang emosi, moral, agama dan aspek estetik bukanlah garapannya. Hal ini mungkin dapat diterima kalau aspek-aspek itu dapat dibagi dalam kotak-kotak yang berdiri sendiri. Akan tetapi yang di didik itu manusia seutuhnya dan bidang-bidang tersebut erat bertalian dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Jadi penilaian sebenarnya tidak harus menekankan pada hanya satu aspek saja, tetapi menyangkut berbagai aspek kepribadian secara menyeluruh.

Pada beberapa tahun ke belakang Beeby(1979:126) melaporkan praktek penilaian pendidikan di Indonesia semata-mata bertujuan untuk bias berhasil melanjutkan pelajaran ke universitas dan bukan untuk mendapatkan kesimpulan mengenai apa yang telah dicapai oleh seorang murid dari 12 tahun belajar yang telah dijalaninya. Selanjutnya ia menyatakan bahwa penilaian semacam ini menyempitkan perhatian murid dan guru hanya pada studi yang ditunjukkan untuk berhasil masuk perguruan tinggi. Keadaan ini lebih diperparah dengan adanya isu yang cukup hangat secara nasional dengan “mempermainkan” angka-angka pada raport saat berkumandangnya kebijakan penerimaan mahasiswa baru tanpa tes di beberapa perguruan tinggi (PMDK).

Disadari betul bahwa secara makro hasil penilaian dapat dijadikan indikator pencapaian keberhasilan suatu lembaga dan sebagai bahan dalam meningkatkan performa lembaga, tetapi kecenderungan yang terjadi malah menjauhkan dari harapan itu. Seorang guru (Suparman, 1999:59) menyesalkan bahwa sistem penilaian saat ini banyak diarahkan kepada upaya pemeriksaan perbedaan-perbedaan individual antara siswa yang satu dengan siswa yang lain dalam setiap bidang studi.

Dalam situasi yang dikemukakan di atas, hubungan antara penilaian dan kurikulum/sistem pendidikan sekolah hampir tidak ada. Pendefinisian kembali tentang konsep penilaian merupakan alternatif dalam reorientasi penilaian pendidikan pada tingkat persekolahan di Indonesia.

2.Orientasi Pada Mutu Eksternal (Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat)

Keberhasilan suatu program pendidikan dalam hal ini kompetensi lulusannya, tidak saja ditentukan oleh Pembina Progrean (guru, kepek), akan tetapi dibutuhkan pula oleh pemakai lulusannya serta masyarakat pada umumnya yang secara langsung atau tidak langsung akan terkena akibat dari pada lulusan program pendidikan tersebut. Jadi dalam kasus IKIP misalnya, yang hampir setiap hari diberitakan dalam media masa jika kita hendak secara sehat memahaminya hendaknya kita harus mengenali terlebih dahulu siapa-siapa yang sebenarnya berkepentingan dan peduli terhadap IKIP. Dengan demikian program pendidikan IKIP ini selaras dengan kebutuhan mereka (Subino, 1991:2)

Mengutip kembali ulasan Beeby (1979:126) bahwa praktek penilaian pendidikan di Indonesia menyulitkan pelajaran keterampilan praktis dan kerja di masyarakat memperoleh pijakan yang kuat di sekolah betatpun dilakukan perubahan-perubahan kurikulum oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Dengan demikian maka penilaian berhasil tidaknya lulusan suatu program pendidikan tidak secara subyektif dinilai oleh orang-orang dalam lembaga itu sendiri, yaitu guru-guru atau kepala sekolah, tetapi juga turut dinilai oleh pemakai lulusan dan lebih-lebih oleh kelompok profesional.

Adanya pihak luar yang bertindak sebagai penilai tingkat pencapaian keberhasilan pendidikan serta lulusannya, maka hal ini telah merupakan peletakan dasar bagi perbaikan dan pengembangan program yang berkesinambungan yang dilaksanakan atas dasar kesadaran dan inisiatif sendiri (Depdikbud, 1984:23).

Data-data lapangan menunjukkan bahwa ada kecenderungan penilaian pendidikan memang sudah berorientasi pada nilai-nilai praktis. Sebagian masyarakat memberikan “judgement” bahwa sekolah yang baik adalah yang lulusannya cepat memperoleh pekerjaan karena dibekali keterampilan-keterampilan praktis. Bahkan keadaan ini sudah mengalihkan perhatian masyarakat untuk mendidik anak-anaknya ke lembaga-lembaga kursus, ketimbang meneruskan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

Namun demikian jika ditelaah lebih lanjut akan nampak bahwa pemakaian itu bersifat parsial. Mereka melihat pendidikan sebagai upaya mempersiapkan manusia menjadi mekanistik atau instrumental.

Pandangan di atas mengakibatkan penilaian terhadap pendidikan sekolah hanya mengandung nilai-nilai praktis. Sementara itu tidak sedikit orang-orang (orang tua, masyarakat pendidikan, bahkan segelintir pakar dan pengambil kebijakan) terseret arus gelombang pasar pekerjaan yang membentuk konsepsi pendidikan tertentu dan mewarnai makna yang terkandung dalam penilaiannya. Kemudian muncul polemik, adanya dua konsep pendidikan yang dikotomis; pendidikan sebagai kebutuhan hakiki manusia (kebebasan individu) dan pendidikan yang berorientasi pasar.

Marilah kita renungkan bagaimana arah penilaian pendidikan dalam konteks kenyataan seperti di atas. Sebagai rambu-rambu, saran yang diajukan oleh Kepala Pusat Pengujian Depdikbud, Jahja Umar, Ph.D. (1992) patut menjadi alternatif untuk dapat memenuhi konsepsi pendidikan menurut UUSPN yakni penilaian hendaknya berorientasi pada hasil yang dicapai individu dan lembaga serta penilaian hendaknya berorientasi pada relevansi (kebutuhan masyarakat).

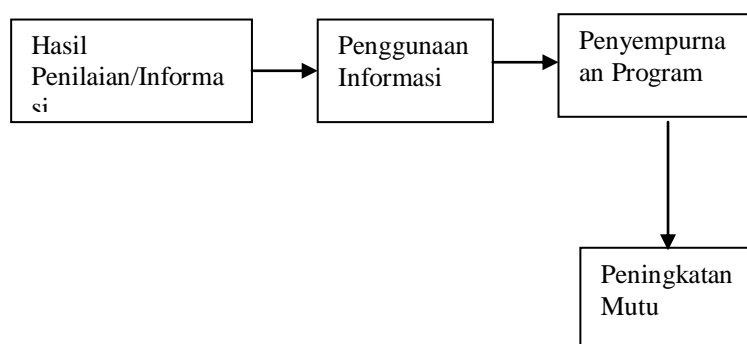
I. Hasil Penilaian dan Peningkatan Mutu Sekolah

Seringkali para “policy maker” melihat bahwa peningkatan mutu pendidikan banyak diupayakan melalui penyediaan sarana yang lengkap, pembaharuan kurikulum atau peningkatan biaya pendidikan, tanpa menyadari bahwa salah satu komponen dalam proses administrasi pendidikan yang menghasilkan informasi paling berharga dalam meningkatkan mutu pendidikan sering terabaikan, yang sering terlupakan dalam pemanfaatannya yang lebih luas ini tiada lain adalah penilaian.

Pada bagian awal sudah disinggung bahwa hasil penilaian merupakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan program-program pendidikan. Di samping itu informasi tersebut dapat digunakan bagi kepentingan sertifikasi, seleksi, remedial, promosi dan sebagainya, serta untuk pertanggungjawaban pelaksana kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Jahja Umar, 1992:12).

Saat ini penilaian hanya diakitkan dengan prestasi yang dicapai setiap siswa yaitu berupa angka-angka, dan walaupun dijadikan bahan untuk perbaikan hanya digunakan pada kepentingan yang sangat mikro sifatnya, seperti penyempurnaan metode mengajar atau pengembangan bahan ajar (Cece Herawan, 1990).

Hubungan antara penilaian dan peningkatan mutu pendidikan dapat digambarkan pada diagram sebagai berikut :



Pada bagan di atas nampak bahwa hasil penilaian itu berupa informasi tentang berbagai hal (Kurikulum, guru, prestasi siswa dan sebagainya). Data-data ini digunakan untuk berbagai kepentingan pula sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya,

termasuk bagi perbaikan dan penyempurnaan program sehingga mutu pendidikan diharapkan dapat meningkat.

Berdasarkan pernyataan di atas jelaslah bahwa hasil-hasil penilaian berupa informasi dapat mendiagnosis komponen-komponen yang berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan. Karena itu ada baiknya kita perhatikan indikator-indikator sekolah-sekolah bermutu dan yang tidak bermutu diadaptasi dari pandangan beberapa ahli.

Sekolah Bermutu	Sekolah tidak Bermutu
1. Masukan yang tepat	1. Masukan yang banyak
2. Semangat kerja tinggi	2. Pelaksanaan kerja santai
3. Gairah motivasi belajar tinggi	3. Aktivitas belajar santai
4. Penggunaan biaya, waktu, fasilitas, tenaga yang professional	4. Boros memakai sumber-sumber
5. Kepercayaan berbagai pihak	5. Kurang peduli terhadap lingkungan
6. Tamatan berkualitas	6. Lulusan hasil katrol
7. Keluaran yang relevan dengan kebutuhan masyarakat	7. Keluaran tidak produktif

Untuk memperoleh informasi yang tepat, sesuai dengan makna melalui penilaian maka factor-faktor seperti alat penilaian, orang yang melakukan penilaian, aspek-aspek yang dinilai dan situasi penilaian perlu mendapat perhatian agar peranan penilaian dalam peningkatan mutu sekolah menjadi lebih fungsional.